FGD RENCANA INDUK TRANSPORTASI NASIONAL (RITN)
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
JAKARTA, 2 OKTOBER 2019

SupplyChain Indonesia untuk logistik Indonesia lebih baik

KONEKTIVITAS DAN RANTAI PASOK 2045

Setijadi | setijadi@SupplyChainIndonesia.com

PROFIL SINGKAT

SETIJADI

Chairman
Supply Chain Indonesia

Anggota Dewan Pakar
Badan Penelitian dan Pengembangan,
Kementerian Perhubungan

Wakil Ketua Umum
Gabungan Importir Nasional
Seluruh Indonesia (GINSI)

Kompartemen Penelitian
DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia
(ALFI) - Jawa Barat

- Supply Chain Indonesia (SCI) adalah lembaga independen yang bergerak dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, konsultasi, penelitian, dan pengembangan bidang logistik dan *supply chain*.
- SCI menjadi wadah informasi, interaksi, dan komunikasi para praktisi, akademisi, birokrasi, peneliti, dan pemerhati bidang logistik dan *supply chain* di Indonesia.
- SCI berperan dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja logistik untuk perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN.
- SCI juga berkontribusi dalam perbaikan dan pengembangan logistik melalui beberapa kementerian dan lembaga pemerintah terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain, termasuk dalam implementasi Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional.

1

FENOMENA KONEKTIVITAS DAN RANTAI PASOK

2

KINERJA DAN BIAYA LOGISTIK NASIONAL

3

REGULASI RANTAI PASOK

4

PELUANG DAN TANTANGAN RANTAI PASOK

1

FENOMENA KONEKTIVITAS DAN RANTAI PASOK

PERMASALAHAN RANTAI PASOK KOMODITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK

SUPPLYCHAIN INDONESIA

Harga Cabai Melonjak hingga Rp 100.000/Kg, Mendag: Suplai Terganggu

Rolando - detikFinance

7 komentar

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita/Foto: Lamhot Aritonang

Jakarta - Jelang Hari Raya Idul Adha, harga cabai rawit merah di pasar meroket drastis, salah satunya di Pasar Sumber Arta Jatibening, Bekasi, harga cabai merah bahkan menyentuh Rp 100 ribu/kilogram (kg). Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukito mengatakan hal tersebut terjadi terkait suplly (penawaran) dan demand (permintaan) cabai.

Sumber: finance.detik.com

Persoalan Krusial Pemerintah Soal Pangan: Distribusi dan Data

Pedagang sayur di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur. Foto: Abdul Latif/kumparan

Sumber: kumparan.com

Bawang Merah Mahal, Menteri Amran Sebut Ada Masalah Distribusi

Reporter: Caesar Akbar
Editor: Rahma Tri
Kamis, 4 April 2019 13:00 WIB

KOMENTAR 0 0 0

Sumber: bisnis.tempo.co

Beras RI Mahal: Harga Internasional Rp6.200, Lokal Rp8.000

NEWS - Efrem Siregar, CNBC Indonesia | 04 July 2019 20:51

SHARE

Sumber: cnbcindonesia.com

PERMASALAHAN RANTAI PASOK KOMODITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK

SupplyChain Indonesia

Sabtu, 07 Sep 2019 16:05 WIB

Kalah Saing dari Negara Tetangga, Biaya Logistik RI Kemahalan

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance

Sumber: finance.detik.com

MASALAH TRANSPORTASI PENYEBAB TINGGINYA BIAYA LOGISTIK

On 05/07/2018

Sumber: kppip.go.id

NASIONAL / KEBIJAKAN

Efektivitas satgas pangan belum terasa, masih ada masalah rantai logistik pangan

Minggu, 10 Februari 2019 / 18:52 WIB

INDEKS

Sumber: https://nasional.kontan.co.id

Home / Ekonomi / Makro

Kementan: Distribusi Pangan Kerap Terkendala Konektivitas

Kompas.com - 25/07/2017, 22:21 WIB

BAGIKAN:

Komentar

Sumber: https://ekonomi.kompas.com

RANTAI PASOK DAN MANAJEMEN RANTAI PASOK (SCM)

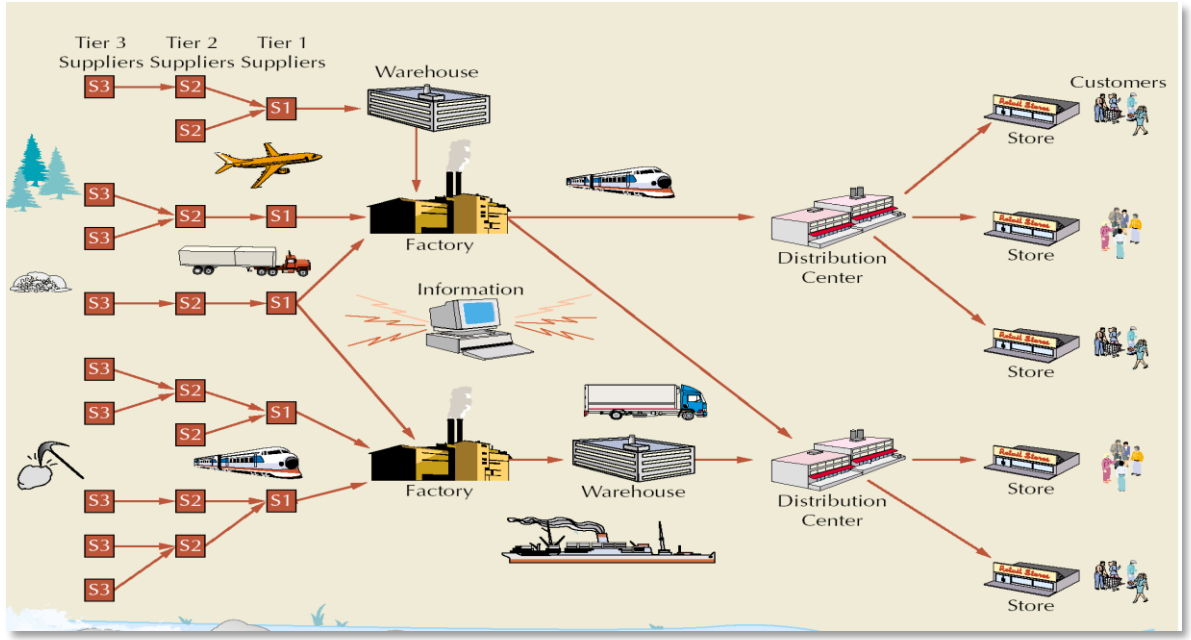

Source: Russell & Taylor (2006)

Supply chain management (SCM) is an **integrating function** with primary responsibility for linking **major business functions** and **business processes** within and across companies into a cohesive and high-performing business model.

(Council of Supply Chain Management Professionals)

RIGHT PRODUCT
RIGHT TIME
RIGHT PLACE
RIGHT QUANTITY
RIGHT QUALITY
RIGHT CONDITION
RIGHT COST

SUPPLY CHAIN: PEMASOK → MANUFAKTUR → DISTRIBUTOR → PENGECER → PELANGGAN

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT: PASOKAN → PERMINTAAN

CONTOH: RANTAI PASOK KOMODITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK

BERAS

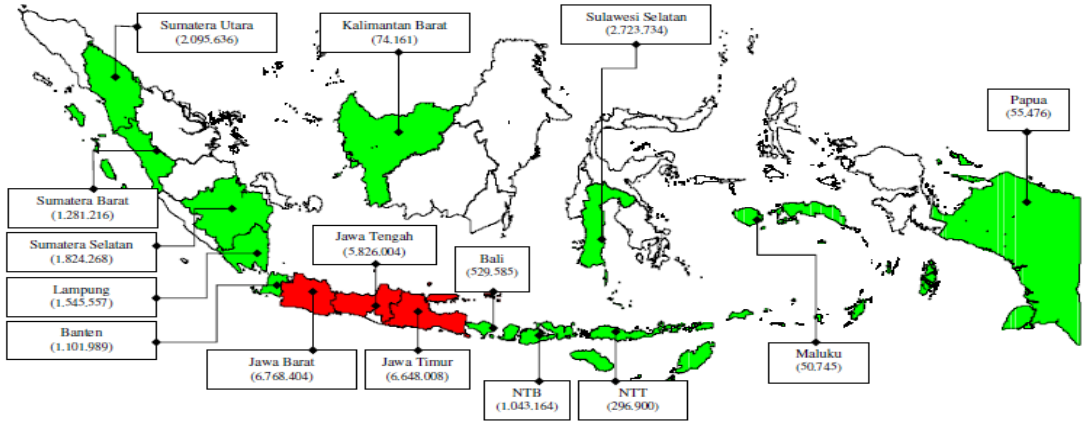

Peta Sentra Produksi

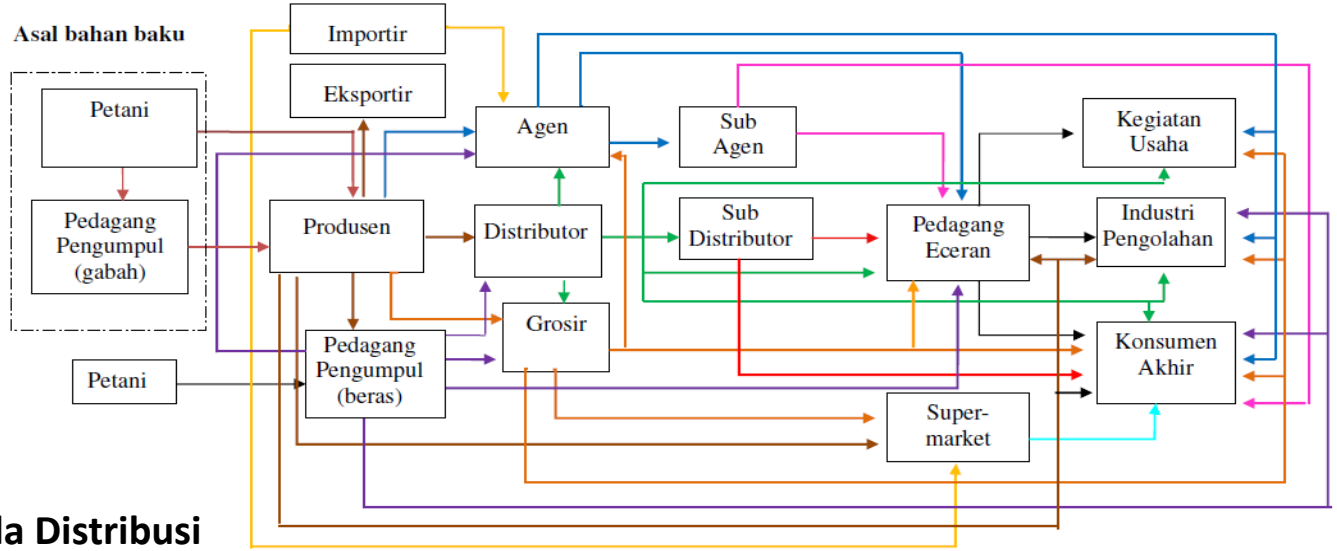

Pola Distribusi

TEPUNG TERIGU

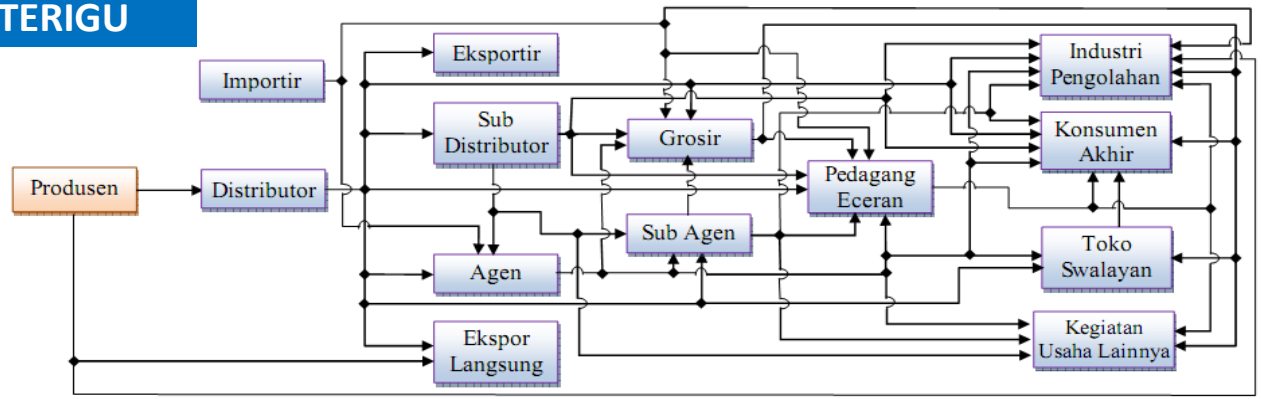

Pola Distribusi

Sumber: BPS (2009)

ANALISIS SINGKAT RANTAI PASOK KOMODITAS BARANG KEBUTUHAN POKOK

- Rantai pasok menggunakan beberapa pola saluran distribusi yang berbeda-beda antar wilayah di Indonesia
- Pengontrolan yang sulit terhadap aspek produksi dan distribusi
- Indikasi penguasaan oleh beberapa pihak tertentu

FAKTOR-FAKTOR PEMENGARUH RANTAI PASOK

INFRASTRUKTUR

REGULASI

BIROKRASI

FAKTOR KOMODITAS

KERAGAMAN KOMODITAS

FAKTOR WILAYAH

LUAS WILAYAH 1,905 JUTA KM^2

BENTUK KEPULAUAN 17.504 PULAU

FAKTOR DEMOGRAFI

JUMLAH PENDUDUK 267 JUTA JIWA*

SOSIAL BUDAYA

FAKTOR EKONOMI

TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI* 5,3%

Supply Chain Indonesia

* tahun 2019

SUMBER DAYA MANUSIA

TEKNOLOGI INFORMASI

POLA PERDAGANGAN

TANTANGAN RANTAI PASOK

1. Sifat komoditas yang *perishable* dan musiman
2. Rantai distribusi yang panjang
3. Pemahaman para pelaku terhadap SCM
4. Integrasi para pelaku usaha dan pihak terkait
5. Ketersebaran produksi dan skala ekonominya
6. Kontinuitas, kualitas, dan ketertelusuran yang kurang terjamin
7. Infrastruktur belum memadai
8. Data dan sistem informasi logistik yang belum terintegrasi

Gambar://integrasi.djpt.kkp.go.id

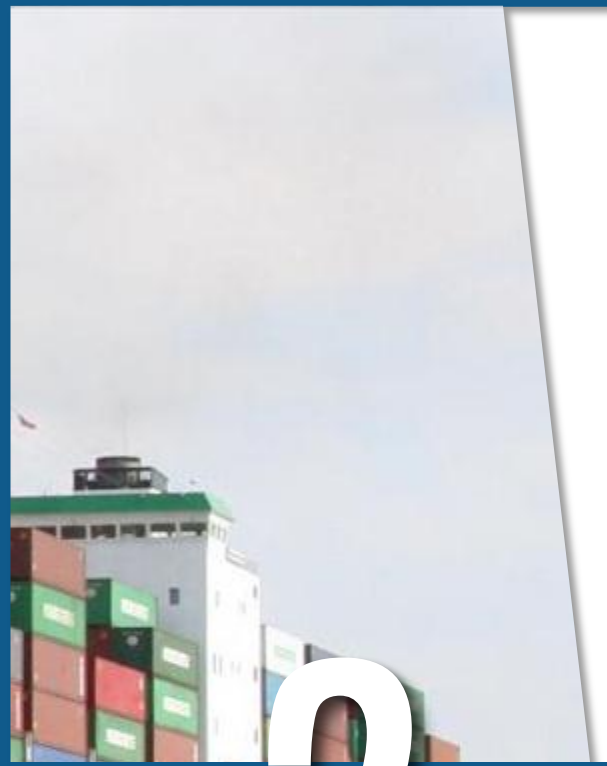

2

KINERJA DAN BIAYA

LOGISTIK NASIONAL

KINERJA SEKTOR LOGISTIK INDONESIA

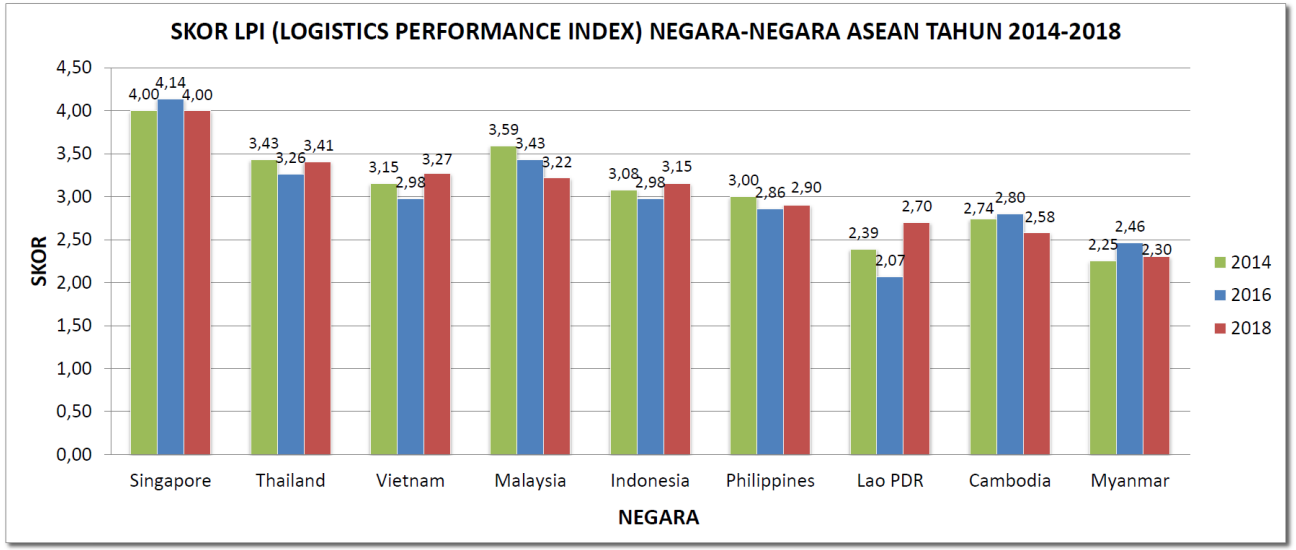

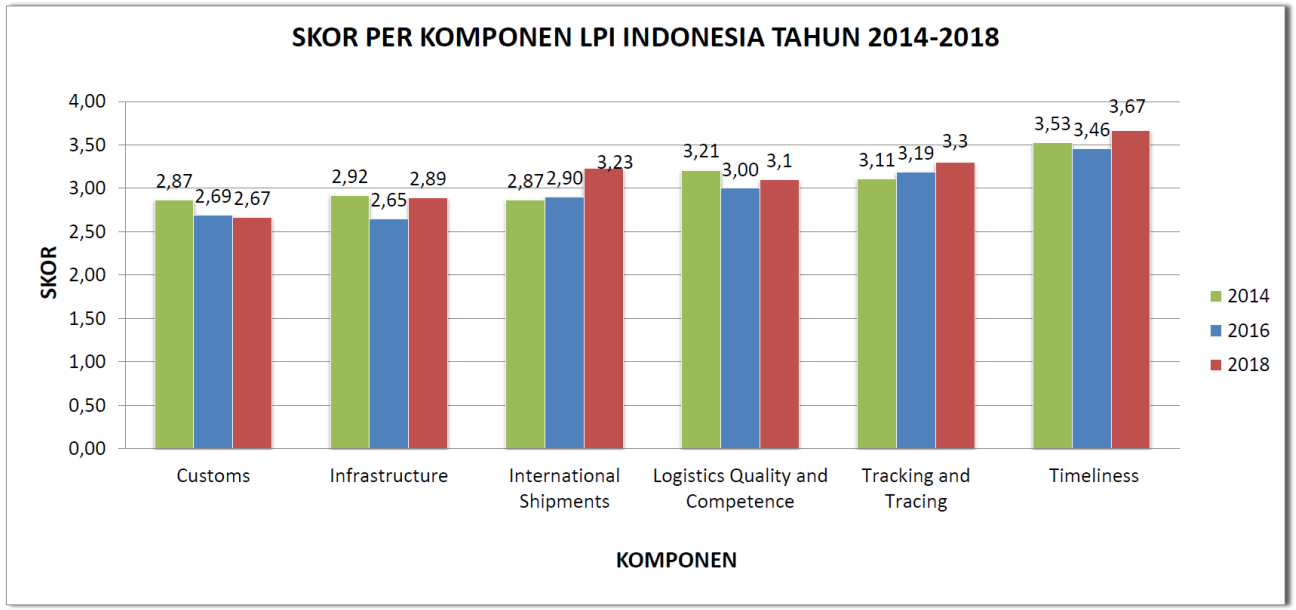

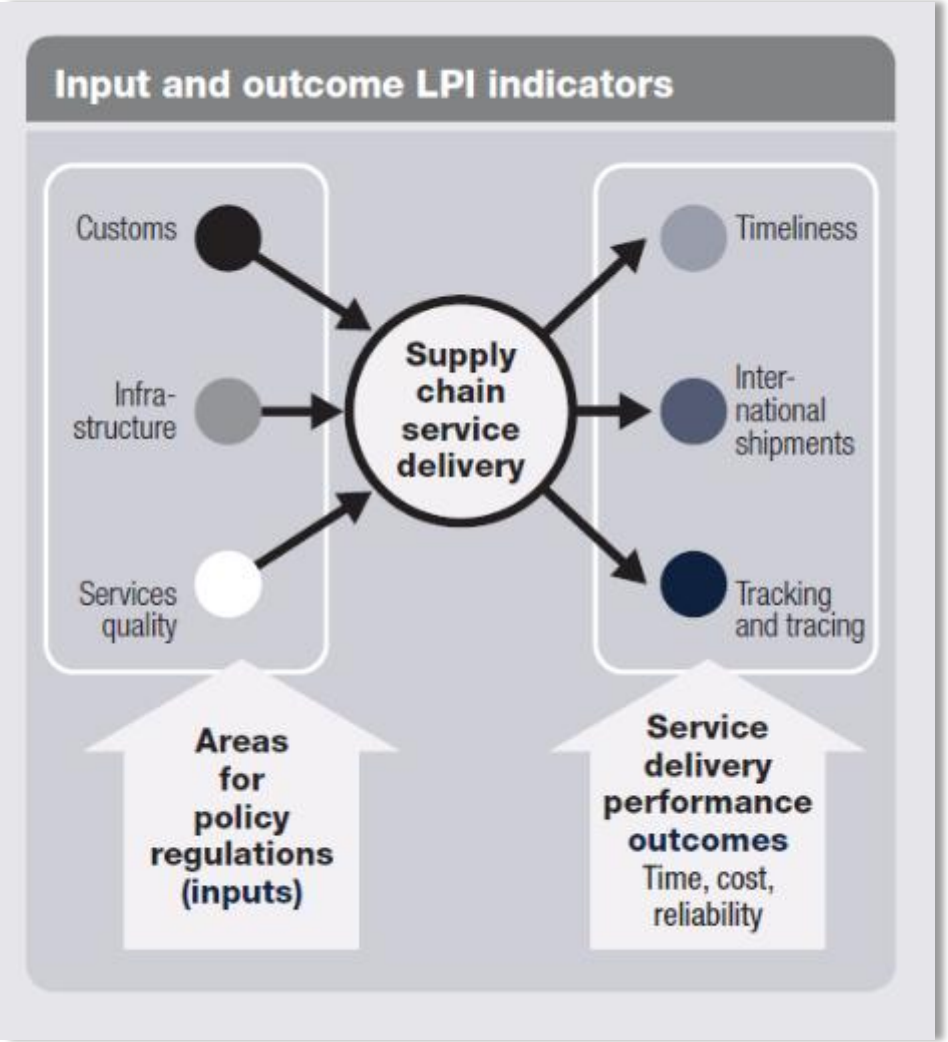

Sumber: World Bank

Sumber: World Bank
Diolah oleh Supply Chain Indonesia (2018)

ILUSTRASI BIAYA TRANSPORTASI BARANG DI INDONESIA

Sumber: World Bank (2014)

Sumber: McKinsey(2013)

Biaya angkutan komoditas **ikan** dari Ambon ke Surabaya rata-rata **Rp 1.800/kg**, sedangkan dari China ke Surabaya rata-rata Rp **700/kg**.

Sumber: www.kkp.go.id

Biaya transportasi berdampak terhadap disparitas harga semen/zak:

- di Jakarta Rp 50-60 ribu,
- di Jayapura Rp 80-100 ribu, dan
- di Wamena Rp 1-1,2 juta.

Sumber: SCI (2015)

- Angkut sapi dari Australia lebih murah 40% daripada NTB.
- Kirim daging sapi dari NTT ke Jakarta Rp 3.000/kg, dari Australia hanya Rp 700/kg

Sumber: finance.detik.com

DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2018

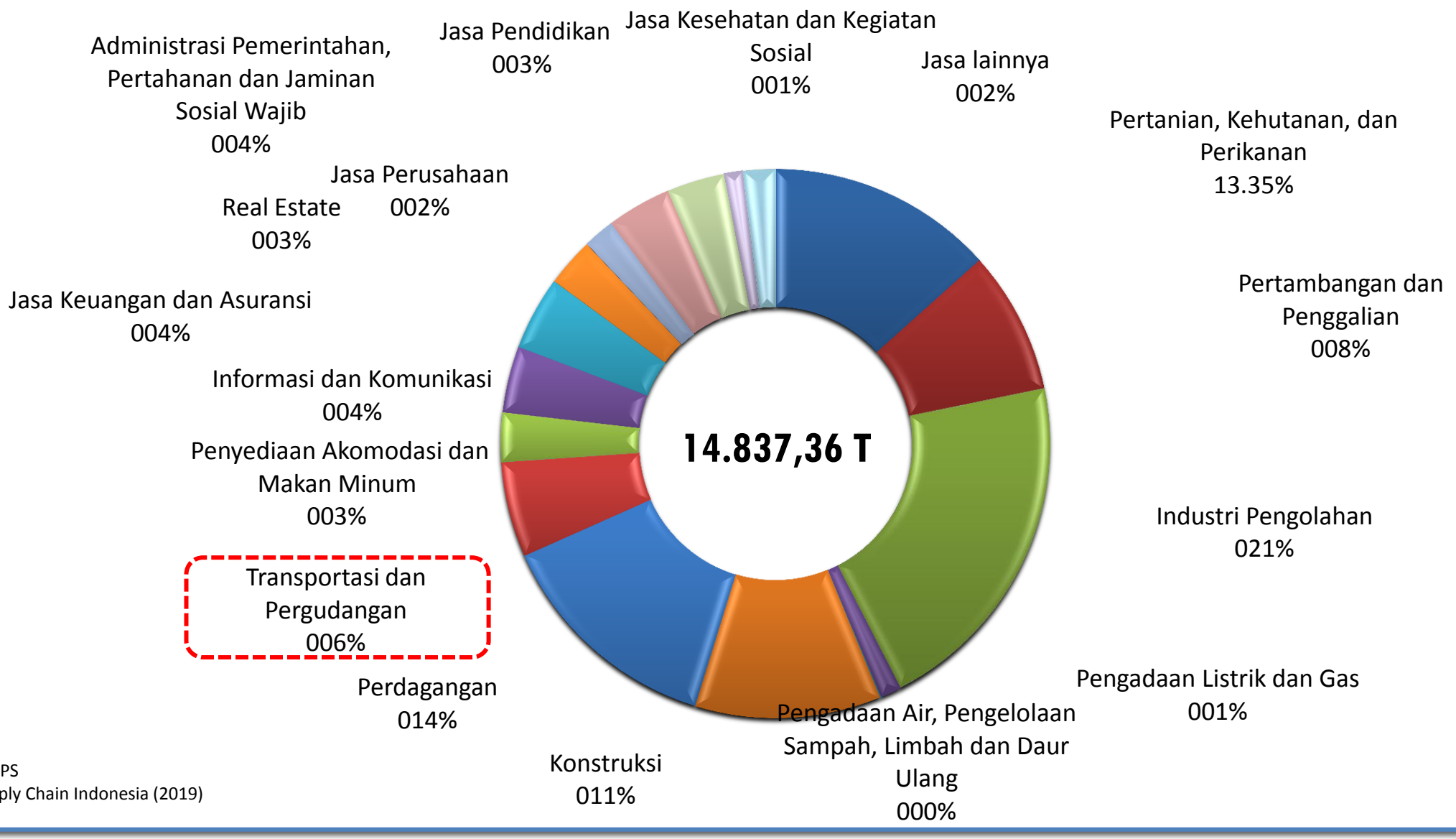

Sumber : BPS
Diolah Supply Chain Indonesia (2019)

DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK BRUTO TAHUN 2018 & PERTUMBUHANNYA

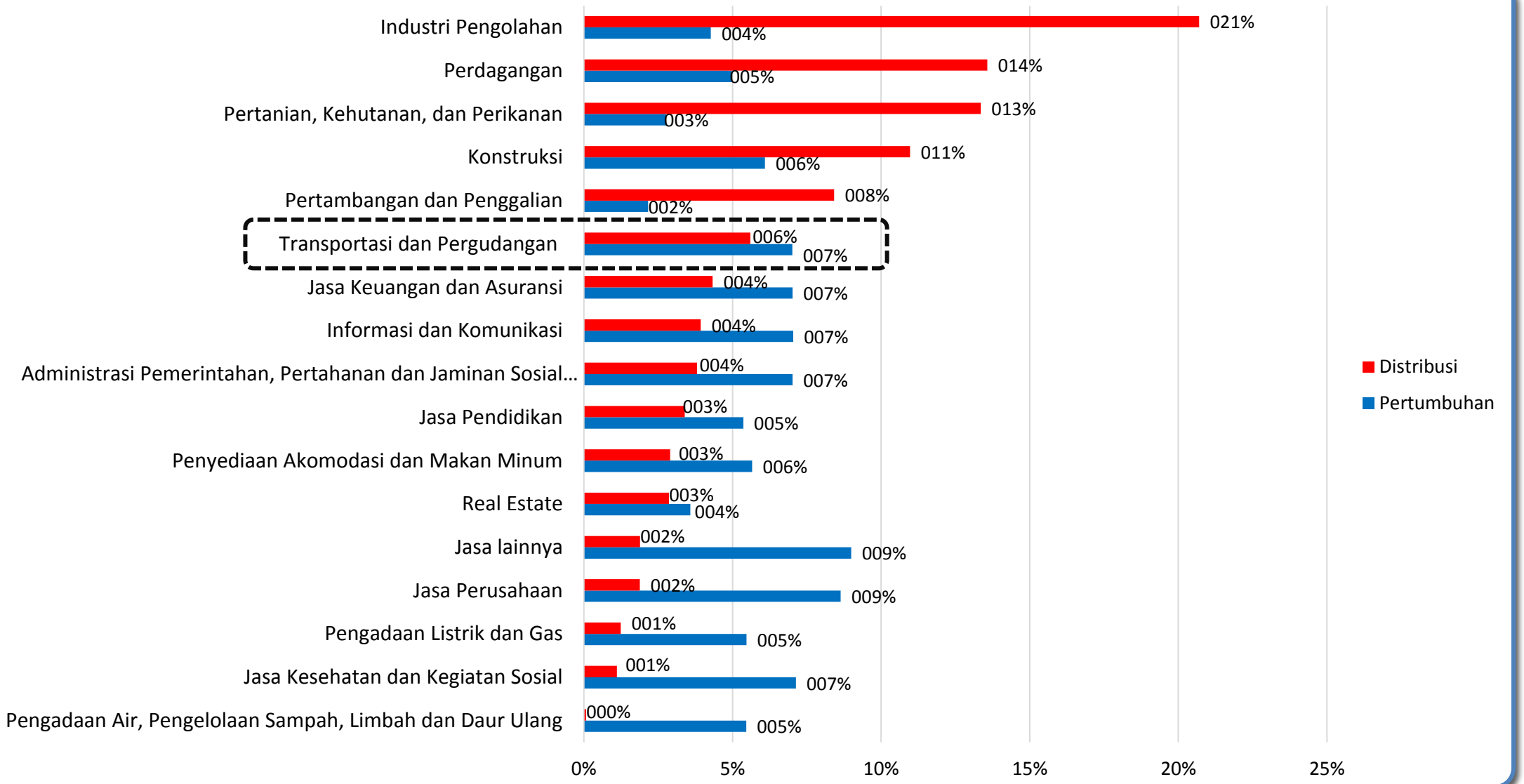

PERKEMBANGAN SEKTOR TRANSPORTASI

i.kinja-img.com

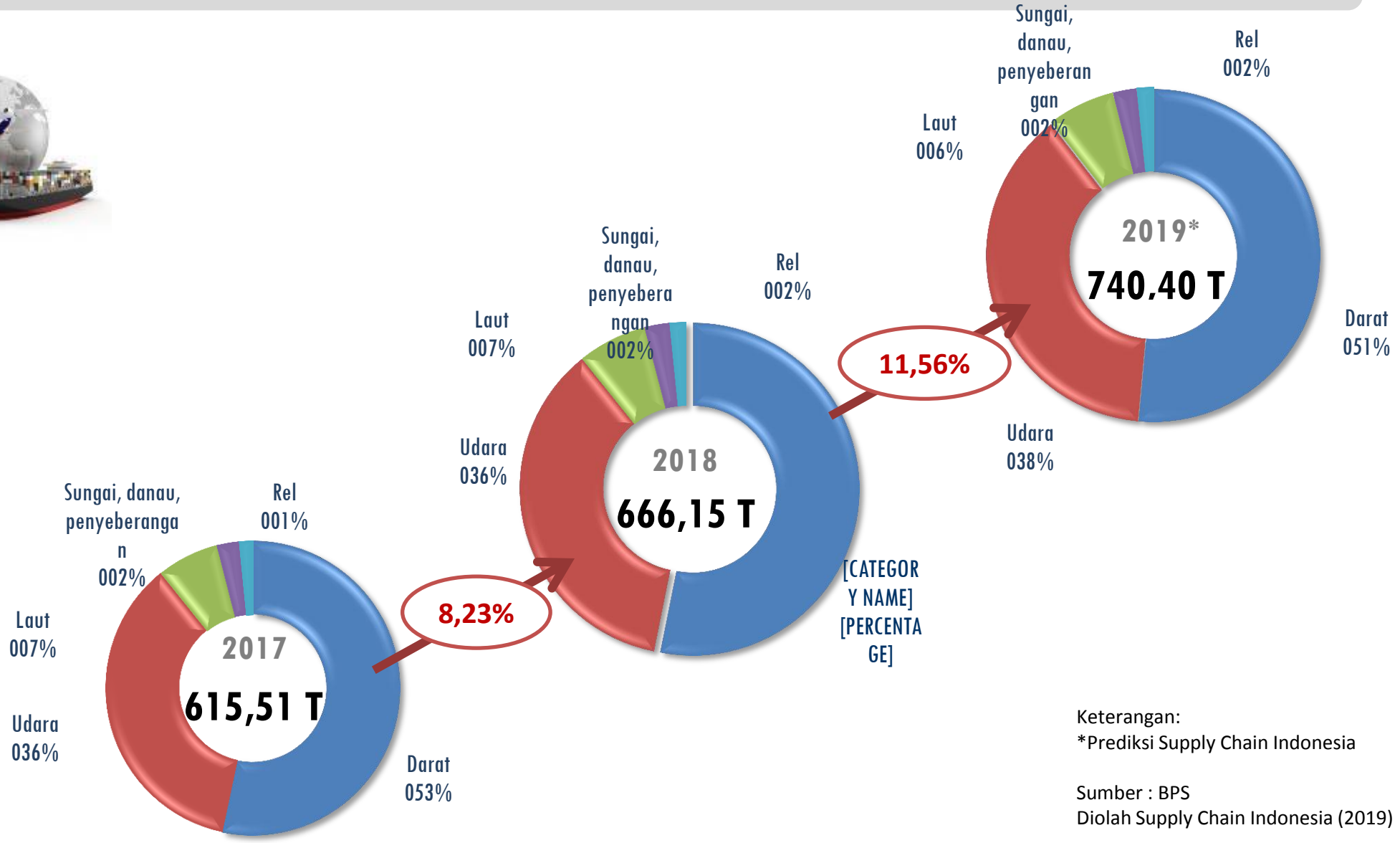

Keterangan:
*Prediksi Supply Chain Indonesia

Sumber : BPS
Diolah Supply Chain Indonesia (2019)

PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI PDB TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN TAHUN 2016-2020

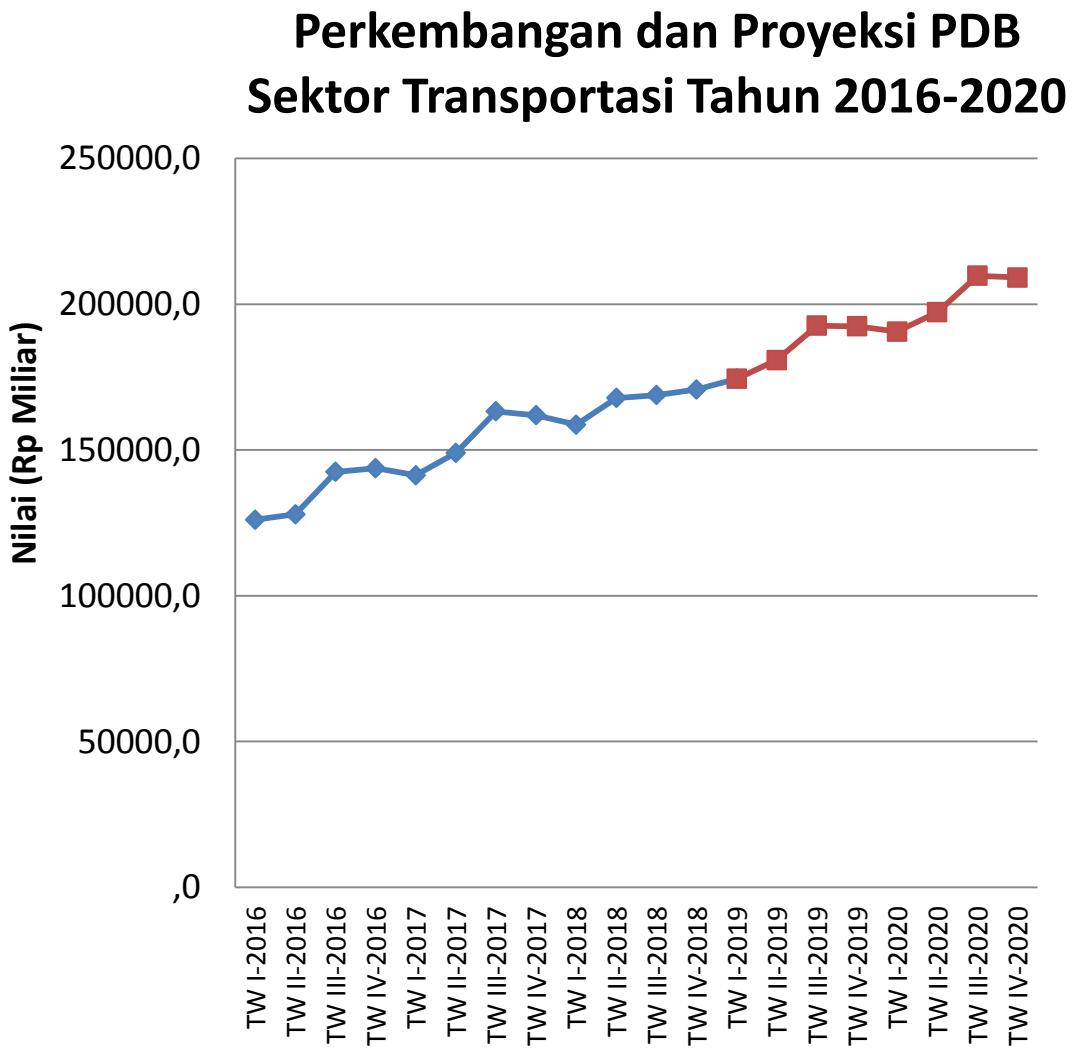

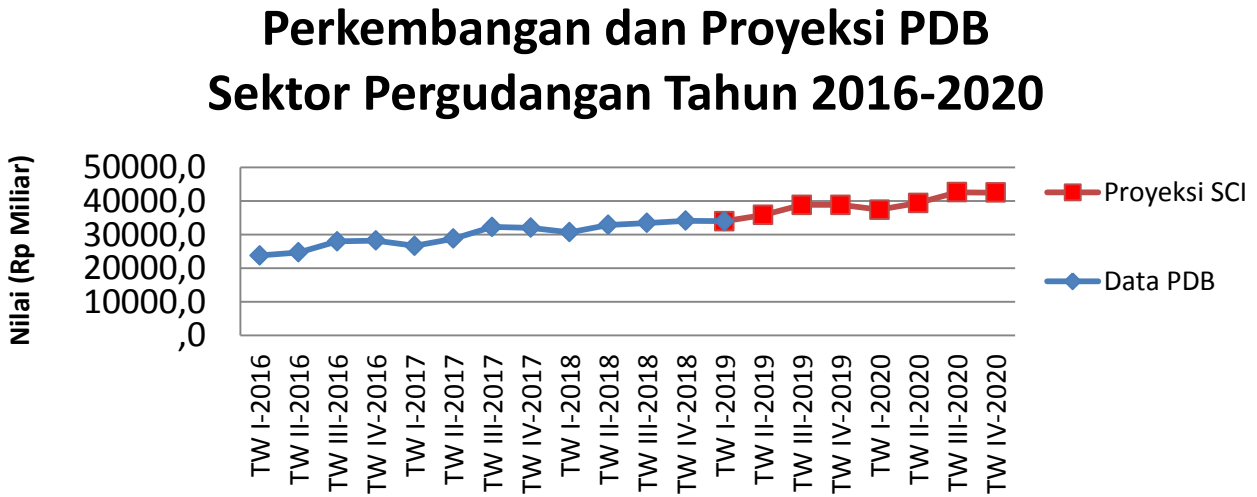

3

REGULASI

TERKAIT RANTAI PASOK

BEBERAPA REGULASI TERKAIT LOGISTIK [1]

SupplyChain Indonesia

UNDANG-UNDANG

- UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
- UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
- UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- UU No. 38 Tahun 2009 tentang Pos
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan

PERATURAN PEMERINTAH

- PP No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan
- PP No. 8 Tahun 2011 tentang Multimoda

PERATURAN PRESIDEN

- Perpres No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
- **Perpres No. 26 Tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional**
- Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019
- Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Supply Chain Indonesia (2017)

BEBERAPA REGULASI TERKAIT LOGISTIK [2]

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- Kepmenhub No. 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal
- Permenhub KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)
- Permenhub No. 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional
- Permenhub No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda
- Kepmenhub No. 725 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional
- Permenhub No. 130 Tahun 2016 tentang Jasa Pengurusan Transportasi

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

- Permendag No. 90 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan
- Permendag No. 24 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar
- Permendagri No. 96 Tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur di Daerah
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 64/M-Dag/Per/9/2016 tentang Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Barang Asal Luar Daerah Pabean ke dan dari Pusat Logistik Berikat

KEMENTERIAN PERTANIAN

- Permentan No. 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Tahun 2015
- Permentan No. 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Tahun 2015
- Permentan No. 12 Tahun 2017 tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras Pemerintah dalam Rangka Stabilisasi harga

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

- Permen No. 5 Tahun 2014 tentang Sistem Logistik Ikan Nasional
- Kepmen No. 45 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pelabuhan Ikan Nasional
- Inpres No. 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan

BEBERAPA REGULASI TERKAIT LOGISTIK [3]

SupplyChain Indonesia

KEMENTERIAN KEUANGAN

- Permenkeu No. 272 Tahun 2015 tentang Pusat Logistik Berikat
- Perdirjen Bea dan Cukai No. Tahun 2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat
- Permenkeu No. 260 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur
- Permenkeu No. 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat untuk Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- Permenkeu No. 95 Tahun 2017 tentang Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Penjaminan Pemerintah di Bidang Infrastruktur oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

- Perdirjen Bea dan Cukai No. Per-01/BC/2016 tentang Tata Laksana Pusat Logistik Berikat
- Perdirjen Bea dan Cukai No. Per-02/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk Ditimbun di Pusat Logistik Berikat
- Perdirjen Bea dan Cukai No. Per-03/BC/2016 tentang Tata Laksana Pengeluaran Barang Impor dari Pusat Logistik Berikat untuk Diimpor untuk Dipakai

PERBAIKAN SISTEM LOGISTIK NASIONAL DALAM PAKET KEBIJAKAN EKONOMI NASIONAL I S.D. XV

PAKET I, VIII, IX, XI: Fokus memberikan fasilitas, insentif, dan menghilangkan regulasi, birokrasi dan biaya yang tidak relevan, untuk mendorong kelancaran arus barang dan efisiensi jasa logistik

Tujuan:
Meningkatkan daya saing industri, logistik, ekspor, investasi, wisata, dan pangan

PAKET	NO.	BENTUK KEBIJAKAN
I	1	Pusat Logistik Berikat (PLB), bertujuan untuk memudahkan mendapatkan Supply Bahan Baku Industri dan etalase produk ekspor.
	2	Single Identity Importir (API satu-satunya tanda pengenal importir), bertujuan untuk mengurangi proses birokrasi dalam pengurusanimpor barang, terutama bahan baku.
	3	Simplifikasi Perizinan Ekspor-Impor, bertujuan untuk menurunkan LARTAS dari 51% (September 2015) menjadi 32% (Mei 2016).
	4	Fasilitas Tidak Dipungut PPN alat transportasi dan jasa transportasi laut serta pelabuhan, bertujuan untuk menurunkan biaya produksi galangan kapal DN (di luar Batam) 10%, dan meningkatkan daya saing galangan kapal DN dan kepelabuhanan
VIII	5	Mengembangkan industri Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) dengan cara memberikan insentif bea masuk 0% untuk 21 pos tarif suku cadang dan komponen pesawat terbang, yang bertujuan untuk menarik perawatan pesawat ke dalam negeri, yang selama ini sebesar 70% dirawat di luar negeri.
IX	6	Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan secara Elektronik (Single Billing), bertujuan untuk mengurangi biaya kepelabuhanan dan menurunkan lead time.
	7	Relaksasi penetapan tarif pos komersial yang sebelumnya tarif Pos Komersial mesti di atas tarif Pos Universal, bertujuan untuk meningkatkan kegiatan usaha jasa pengirman swasta.
	8	Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, Geographical Indications, dan Ekonomi Kreatif, bertujuan untuk memperluas sumber ekspor baru terutama produk-produk UMKM dari wilayah timur Indonesia.
	9	Integrasi Inaportnet system ke dalam INSW system, bertujuan untuk mengurangi jedah waktu antara pengurusan dokumen ekspor/impor dan arus barang.
XI	10	Indonesian Single Risk Management, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan dan efektivitas pengawasan di seluruh proses layanan impor-ekspor, dwelling time di seluruh pelabuhan.

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV (1)

SupplyChain Indonesia

I. MEMBERI PELUANG PASAR BAGI PERUSAHAAN PELAYARAN, GALANGAN KAPAL, DAN *MARINE INSURANCE* NASIONAL

1. Memberikan peluang kepada perusahaan nasional untuk melayani angkutan dan asuransi ekspor/impor barang tertentu
2. Revitalisasi Industri Galangan Kapal, Peralatan Kepelabuhanan & Pelayaran Nasional

II. MENINGKATKAN DAYA SAING PERUSAHAAN PENYEDIA JASA LOGISTIK

3. Peningkatan Keamanan dan Efisiensi Pengiriman Kargo dan Pos Udara (Regulated Agent)
4. Penyederhanaan Persyaratan Perizinan Angkutan Barang di jalan oleh PEMDA
5. Menghilangkan Ketentuan Pembatasan Wilayah Kerja Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Asing
6. Rasionalisasi Persyaratan Modal Izin Angkutan Laut dan Izin Usaha Kepelabuhanan
7. Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha dalam Memperoleh Izin Usaha Keagenan Kapal
8. Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha dalam Memperoleh Izin Usaha Penyelenggaraan Pelabuhan Laut
9. Rasionalisasi Persyaratan Modal Usaha dalam Memperoleh Izin Usaha Bongkar Muat Barang
10. Penyederhanaan Perizinan Penyelenggaraan Pos
11. Penguatan Peran Otoritas Pelabuhan (OP)
12. Peningkatan Efisiensi Biaya Kepelabuhanan dengan Mengurangi Biaya Pemindahan Barang (double handling) di Terminal
13. Standarisasi Dokumen Pergerakan Arus Barang dalam Negeri (Manifes Domestik) Berbasis Elektronik
14. Fasilitas Pengadaan Kapal Bekas Tertentu di atas Usia 15 Tahun
15. Pengembangan SISLOGDA sebagai kelembagaan yang mendukung kebijakan SISLOGNAS dan program TPID untuk Efisiensi Rantai Pasok dan pengendalian inflasi dari Komoditi Pokok.
16. Pedoman Pengurangan Risiko Kerusakan Peti Kemas

Supply Chain Indonesia (2017)

CAKUPAN PAKET KEBIJAKAN EKONOMI XV (2)

III. MEMPERKUAT KELEMBAGAAN INDONESIA *NATIONAL SINGLE WINDOW* (INSW)

17. Penguatan Kelembagaan dan Kewenangan Indonesia National Single Window (INSW) untuk meningkatkan efisiensi logistik

IV. MEMPERMUDAH DAN MEMPERCEPAT ARUS BARANG DI PELABUHAN

18. Penyederhanaan Peraturan Tata Niaga (Ekspor-Impor)

i.kinja-img.com

Supply Chain Indonesia (2017)

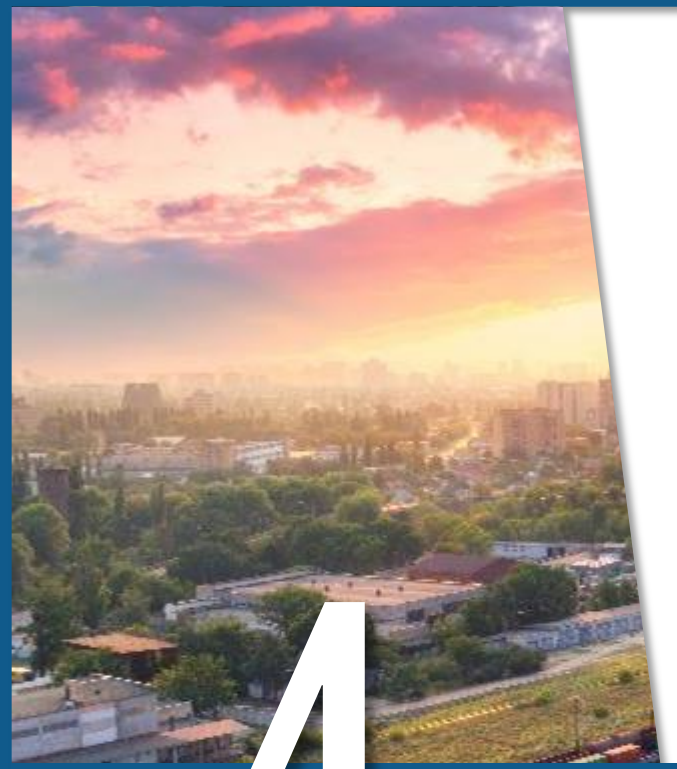

4

PELUANG DAN TANTANGAN RANTAI PASOK DI INDONESIA

VISI INDONESIA 2045

Tahap Pertama (2016 -2024) PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI

- Proses perubahan struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif.

Tahap Kedua (2025 – 2035) PERCEPATAN PERTUMBUHAN BERBASIS INOVASI

- Percepatan investasi dan pertumbuhan industri manufaktur dengan ekspor bernilai tambah tinggi.

Tahap Ketiga (2036 – 2045) MODERNISASI EKONOMI BERBASIS KUALITAS DAN BERKELANJUTAN

- Modernisasi ekonomi dengan mengedepankan kualitas dan pertumbuhan berkelanjutan.
- Proses *rebalancing* ekonomi

Dalam periode 2016-2045, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5,7%/tahun.

Indonesia menjadi negara pendapatan tinggi (keluar dari *middle income trap*) tahun 2036 dan menjadi negara dengan PDB terbesar ke-7 tahun 2045.

Pilar Pembangunan

Pembangunan Manusia dan Penguasaan IPTEK

- Percepatan Taraf Pendidikan Rakyat Indonesia secara Merata
- Peningkatan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan
- Peningkatan Sumbangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam Pembangunan
- Peningkatan Derajat Kesehatan dan Kualitas Hidup Rakyat
- Reformasi Ketenagakerjaan

Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan

- **Peningkatan Investasi dan Daya Saing Ekonomi**
- **Percepatan Industri dan Pariwisata**
- **Pembangunan Ekonomi Maritim**
- **Pemantapan Ketahanan Pangan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani**
- Peningkatan Ketahanan Energi dan Air
- Komitmen terhadap Lingkungan Hidup

Pemerataan Pembangunan

- Percepatan Pengentasan Kemiskinan
- Pemerataan Kesempatan Usaha dan Pendapatan
- **Pemerataan Pembangunan Wilayah**
- **Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi**

Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Kepemerintahan

- Demokrasi Substantif
- Reformasi Kelembagaan dan Birokrasi
- Penguatan Sistem Hukum Nasional dan Antikorupsi
- Politik Luar Negeri Bebas Aktif
- Penguatan Pertahanan dan Keamanan

Sumber : Bappenas, Visi Indonesia 2045

PEMBANGUNAN WILAYAH, KEDAULATAN PANGAN, SERTA PENINGKATAN DAYA SAING DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

SupplyChain Indonesia

AGENDA PEMBANGUNAN WILAYAH

- Wilayah Papua
- Wilayah Maluku
- Wilayah Nusa Tenggara
- Wilayah Pulau Sulawesi
- Wilayah Pulau Kalimantan
- Wilayah Pulau Jawa-Bali
- Wilayah Pulau Sumatera
- Wilayah Pulau Sulawesi

MASALAH KESEJAHTERAAN RAKYAT

- Kelangkaan komoditas
- Harga komoditas mahal
- Fluktuasi harga komoditas
- Disparitas harga komoditas

Strategi Pengembang-an Dukungan Sistem Rantai Pasok

KEDAULATAN PANGAN

DAYA SAING PRODUK/ KOMODITAS INDONESIA

MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) 2015

Supply Chain Indonesia (2016)

LOGISTIK DAN DAYA SAING

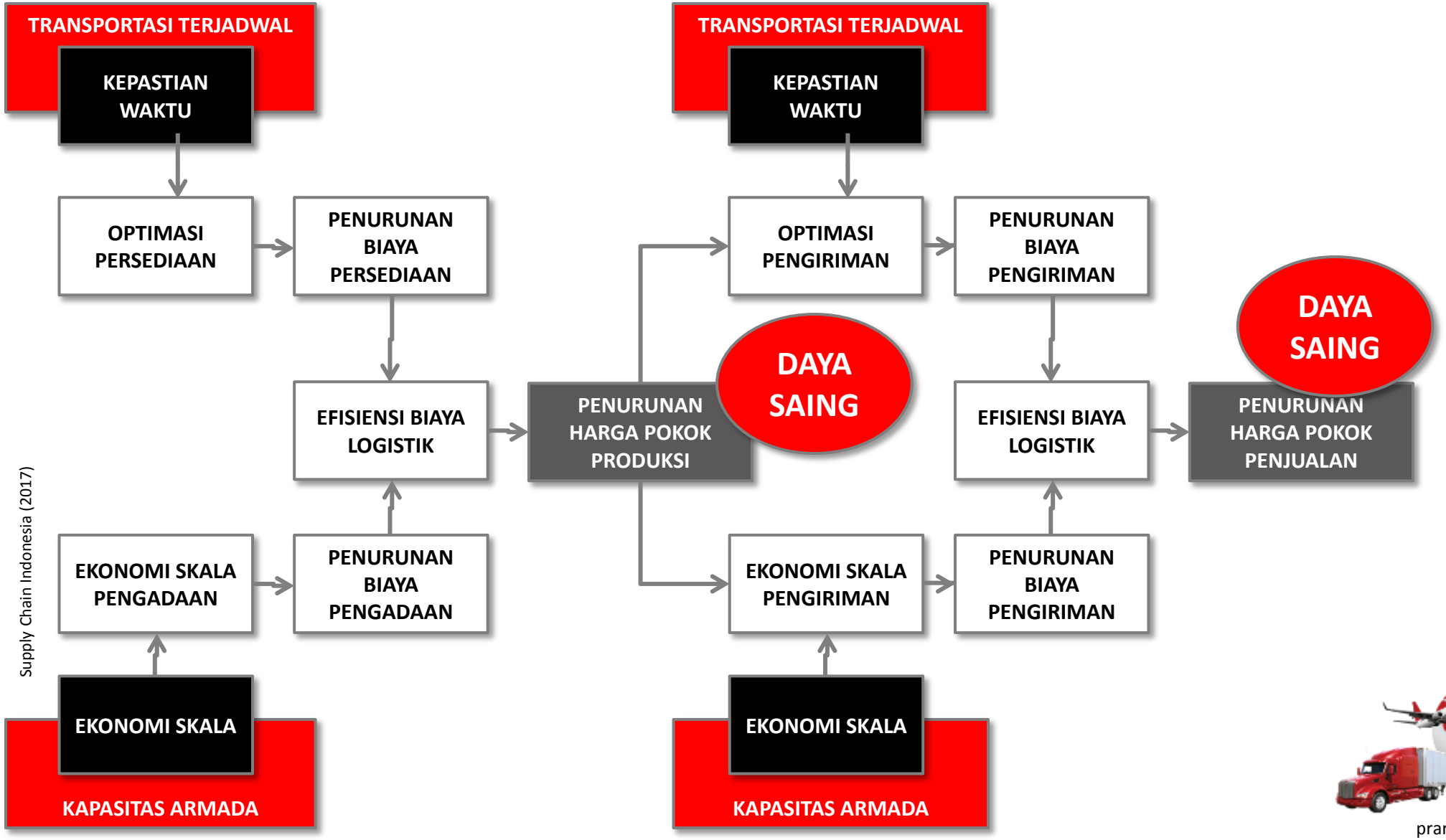

Supply Chain Indonesia (2017)

prarzoo.com

INTEGRASI PENGEMBANGAN WILAYAH DAN TRANSPORTASI

SUPPLYCHAIN INDONESIA

Pengembangan Wilayah / Pusat Pertumbuhan

Kawasan Telah Terbangun

Antarmoda

- Transportasi Darat
- Kereta Api
- *Inland Waterways*
- Short Sea Shipping/ Coastal Shipping

Tol Laut

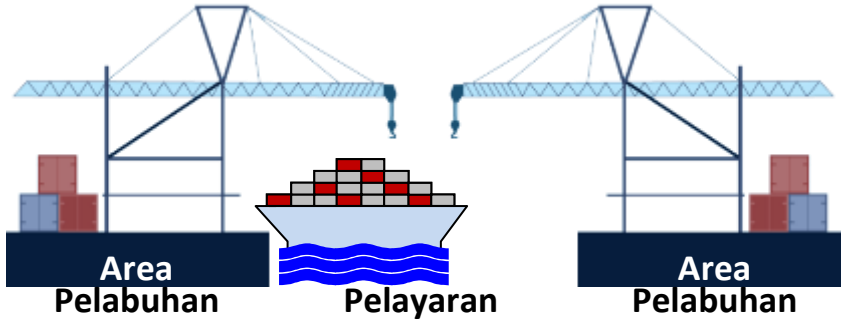

- Pelayaran Komersil
- PSO Angkutan Barang dan Keperintisan
- Pelayaran Rakyat

Antarmoda

- Transportasi Darat
- Transportasi Udara (Jembatan Udara)
- *Inland Waterways*
- *Short Sea Shipping/ Coastal Shipping*

Pengembangan Wilayah / Pusat Pertumbuhan

KTI / Daerah Tertinggal

Ship Follow The Trade

Ship Promote The Trade

Perlu identifikasi secara cermat potensi wilayah

Sumber: Kementerian PPN/BAPPENAS (2018)

SINERGI ANTAR SEKTOR: ILUSTRASI TOL LAUT DAN SEKTOR PERIKANAN

Peluang sinergi Program Tol Laut dan sektor perikanan:

Dari ke-15 trayek Tol Laut, lima trayek diantaranya memiliki potensi sumber daya ikan yang tinggi.

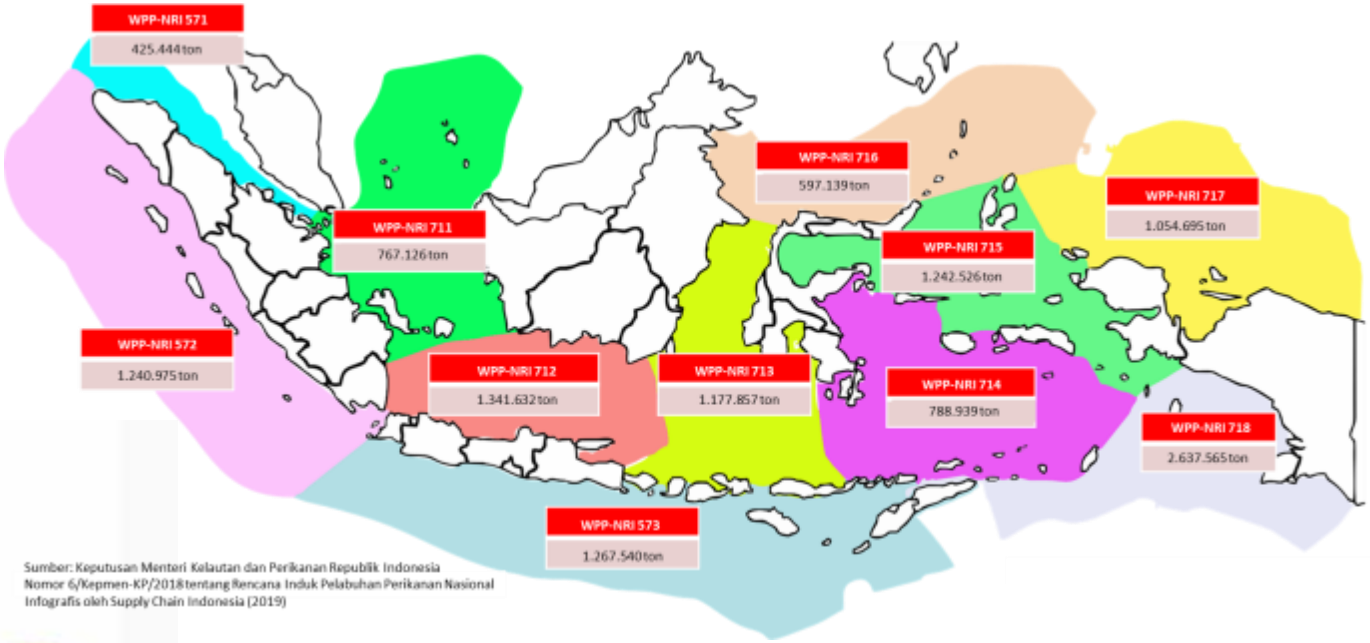

Sumber: Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 6/Kepmen-KP/2018tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional
Infografis oleh Supply Chain Indonesia (2019)

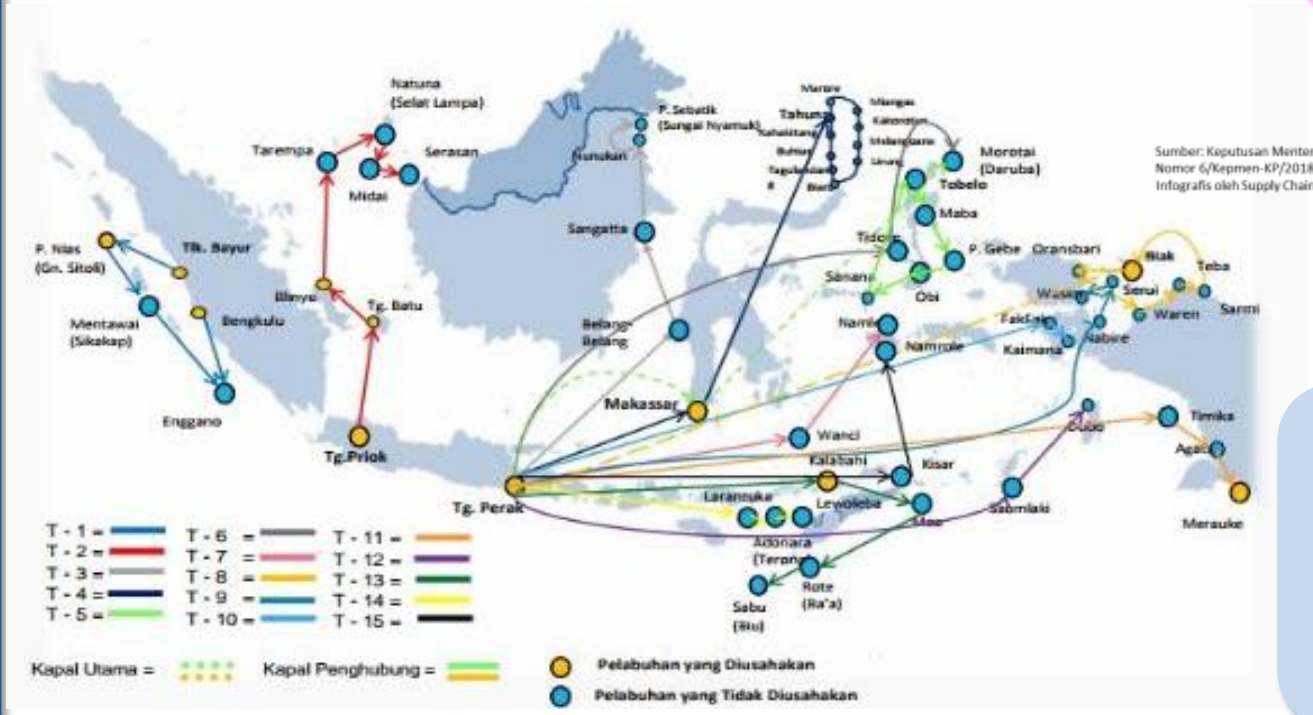

Sumber: Kementerian Perhubungan

WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN INDONESIA

WPPNRI merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi ekslusif Indonesia.

(Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI))

TANTANGAN RANTAI PASOK

1. Sifat komoditas yang *perishable* dan musiman
2. Rantai distribusi yang panjang
3. Pemahaman para pelaku terhadap SCM
4. Integrasi para pelaku usaha dan pihak terkait
5. Ketersebaran produksi dan skala ekonominya
6. Kontinuitas, kualitas, dan ketertelusuran yang kurang terjamin
7. Infrastruktur belum memadai
8. Data dan sistem informasi logistik yang belum terintegrasi

Gambar://integrasi.djpt.kkp.go.id

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR & EKONOMI SKALA

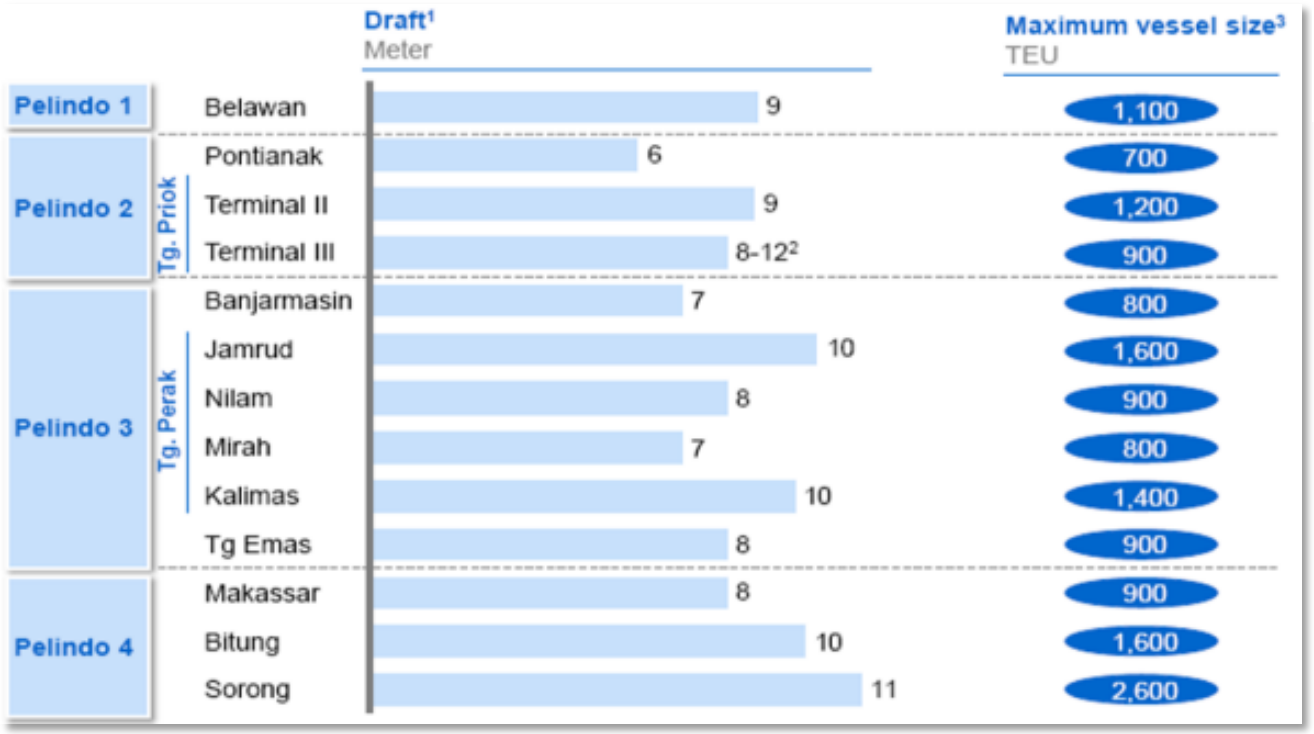

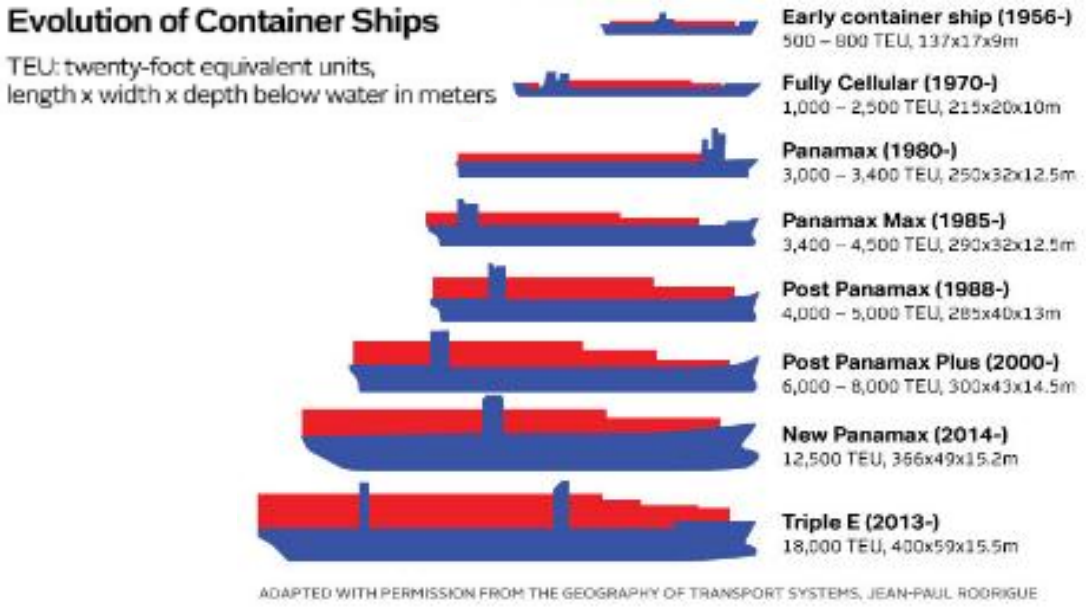

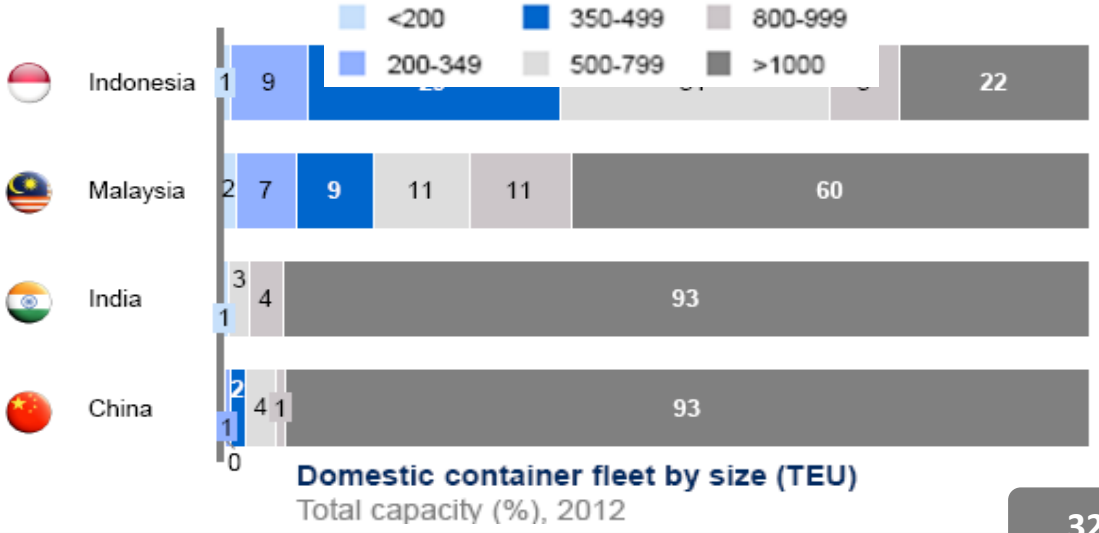

Penggunaan kapal kecil untuk angkutan peti kemas domestik, menyebabkan biaya per TEU menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaan kapal besar.

Mayoritas ukuran kapal di Indonesia berkisar antara 350-800 TEUs, lebih kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang mayoritas berukuran di atas 1000 TEUs.

Sumber: McKinsey, 2013

PENYEIMBANGAN ARUS BARANG DAN SEBARAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK

SupplyChain Indonesia

VOLUME MUATAN

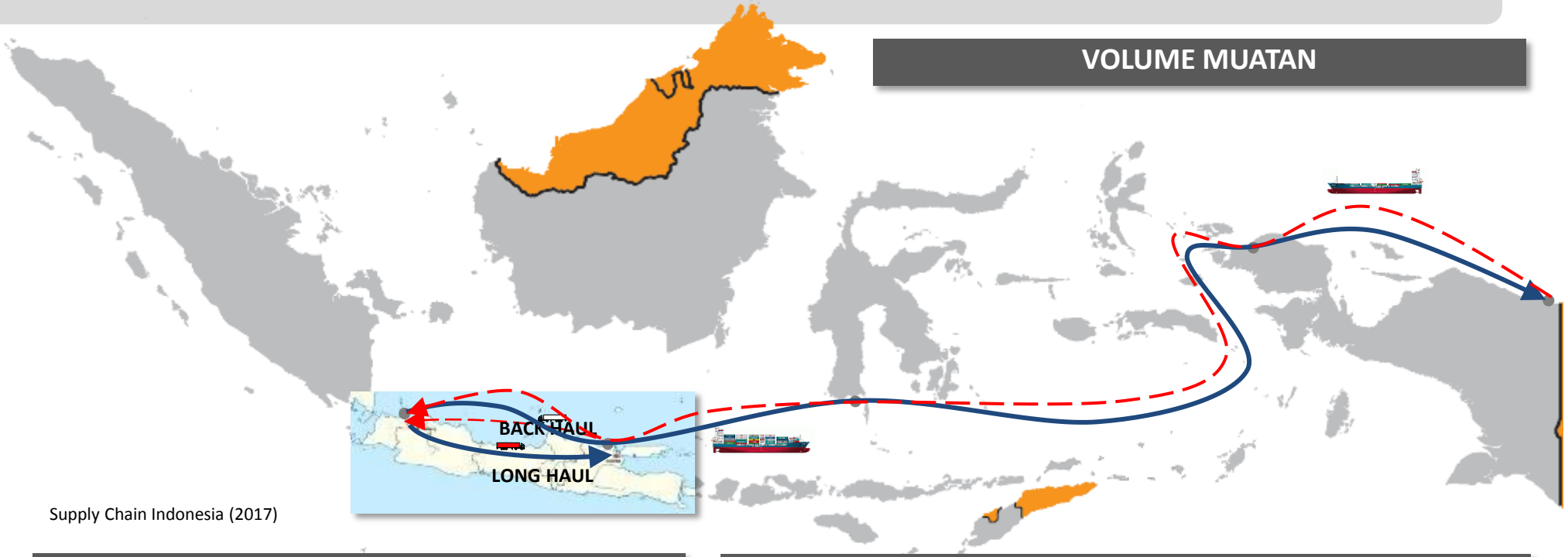

Supply Chain Indonesia (2017)

SEBARAN DEPO KONTAINER

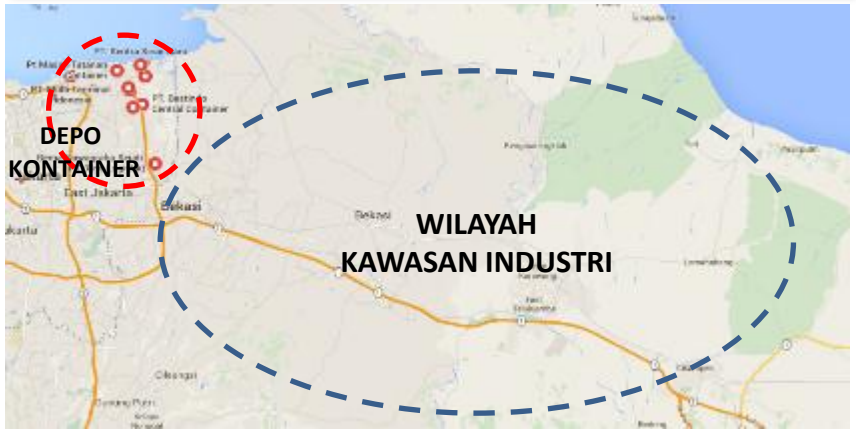

SEBARAN GALANGAN KAPAL

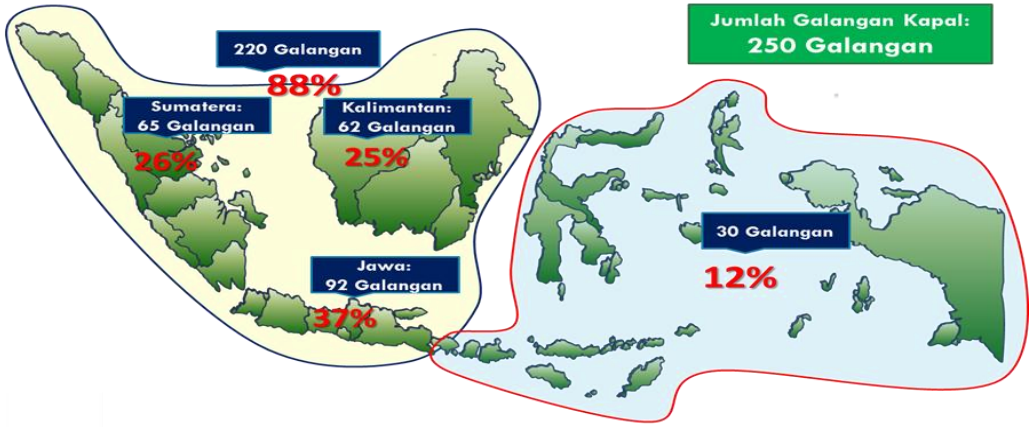

Tri Achmadi (2017)

PENGEMBANGAN MODA TRANSPORTASI: CONTOH KASUS KERETA BARANG

Potensi pemanfaatan *container yard* (CY) kereta api:

- Provinsi Banten: Cilegon
- Provinsi Jawa Barat: Cikarang, Klari, Cibungur, dan Bandung.
- Provinsi Jawa Tengah: Semarang
- Provinsi Jawa Timur: Surabaya dan Jember.

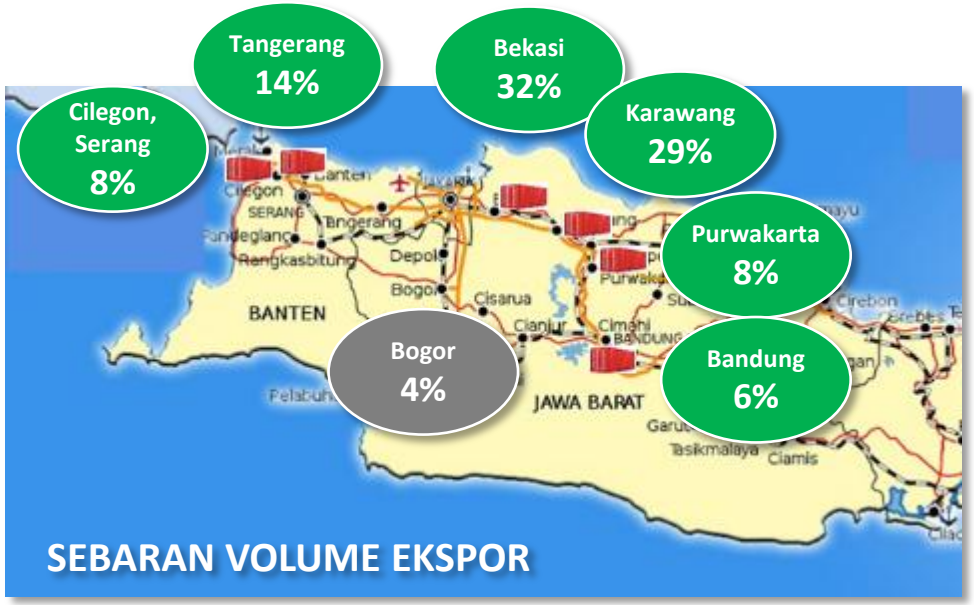

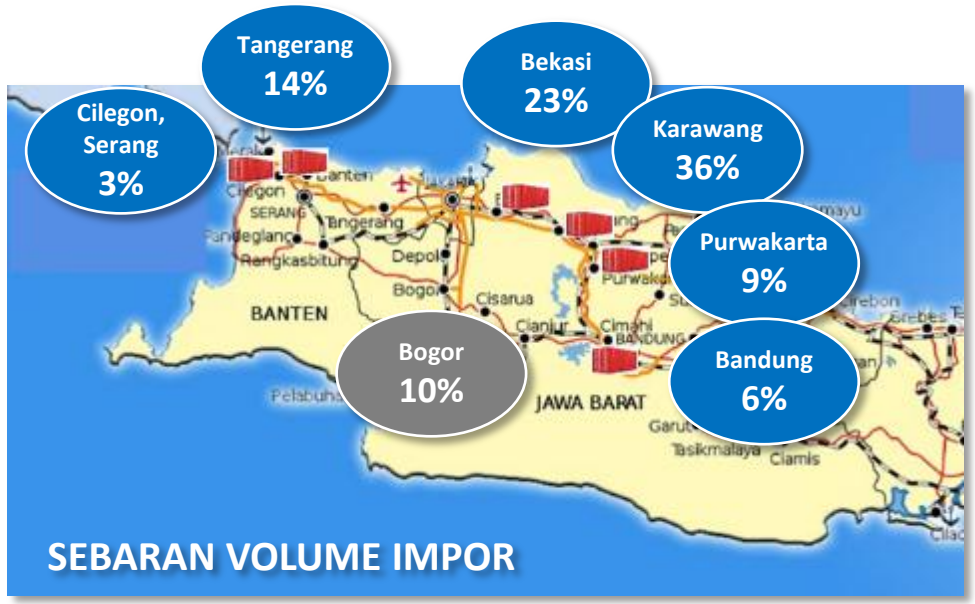

Peta: 3.bp.blogspot.com

CY kereta api dapat dimanfaatkan sebagai tujuan-antara dalam pengiriman barang antara Pelabuhan Tanjung Priok dan lokasi perusahaan atau kawasan industri.

IMPLEMENTASI SCM: ILUSTRASI SEKTOR PERIKANAN

SupplyChain Indonesia

Perancangan Pengendalian, & Pengembangan Sistem, Monitoring & Evaluation

Kementerian/ Lembaga Terkait

- Lembaga pengkajian
- Asosiasi dan komunitas
- Institusi lainnya

Supply Chain Indonesia

PRODUKSI (PENGADAAN)	PENGUMPULAN & PENYIMPANAN	PENGANGKUTAN/ TRANSPORTASI	DISTRIBUSI	PENJUALAN (PENGECER)	KONSUMSI
• Nelayan • Pembudidaya	• Pengumpul • Pengelola storage	• Pelayaran • Penerbangan • Trucking • Kereta Api	• Distributor • Agen	Pengecer	• Rumah tangga • Unit pengolahan

Pembinaan & Pemberdayaan	Infrastruktur Fisik	Pengelola Infrastruktur	Perdagangan	Pembiayaan	Teknologi Informasi	Jasa Pendukung
• KKP • Pemda	• K-PUPR • Kemenhub • K-ESDM	• Pelabuhan • Bandara • Terminal Barang	• Kemendag	• Bank • Non-Bank	• Keminfo • Telkom	• Asuransi

Gambar: www.perikanannusantara.co.id

PENGEMBANGAN KONEKTIVITAS GLOBAL

Indonesia Buka Jalur Alternatif Konektivitas Logistik Global

Translog Today

SINGAPURA -

Pada September 2018, ASEAN Federation of Forwarders Associations (AFFA), Federasi Logistik & Pembelian China (CFLP) dan Kamar Dagang Internasional China (CCOIC Guangxi), Nanning Internasional Logistics Park China-Singapura (CSILP), menandatangani MoU untuk Pembentukan Aliansi Transportasi Multimodal China-ASEAN (Aliansi) saat KTT Investasi Bisnis ASEAN (CABIS) ke 15 Tiongkok.

Guangxi, sebagai pintu gerbang utama Belt and Road Initiative (BRI) dan Koridor Darat-Laut Baru di China barat yang menghubungkan negara-negara ASEAN, dan mempromosikan pembangunan ekonomi regional melalui sistem transportasi multimoda.

Sumber: translogtoday.com

Gambar: socialmediaweek.org

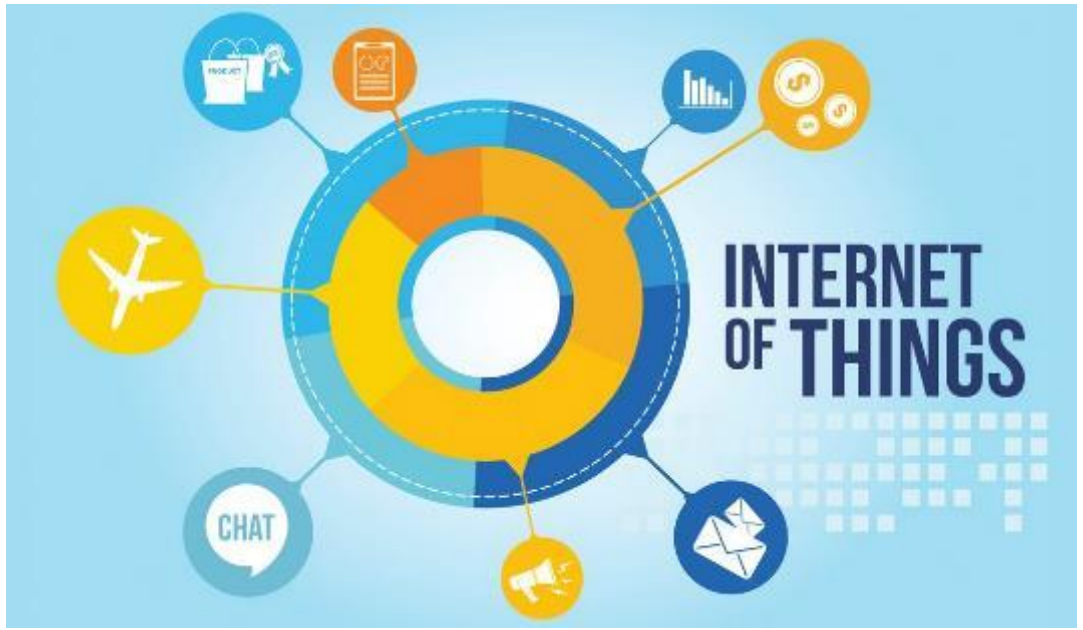

Gambar: www.syniverse.com

SUPPLY CHAIN INDONESIA

untuk logistik Indonesia lebih baik

EDUCATION | TRAINING | CONSULTING | RESEARCH | DEVELOPMENT

Taman Melati B1/22 Pasir Impun, Bandung 40194

Phone : +62 22 720 5375 | Mobile : +62 821 1515 9595

E-mail : sekretariat@SupplyChainIndonesia.com

Website : www.SupplyChainIndonesia.com

Mailing list : SupplyChainIndonesia@googlegroups.com

Mailing list : jasa-logistik@googlegroups.com

LinkedIn : Supply Chain Indonesia

Facebook : Supply Chain Indonesia

@SupplyChainID